

# DAMPAK ABRAHAM ACCORDS TERHADAP DINAMIKA KEAMANAN REGIONAL TIMUR TENGAH

Tara Febriani Khaerunnisa<sup>1</sup>, Syaiful Anam S.IP., M.Sc.<sup>2</sup>, Y.A Wahyuddin S.IP., M.A<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Hubungan Internasional: Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat

<sup>2</sup>Dosen Hubungan Internasional, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat

<sup>3</sup>Dosen Hubungan Internasional, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat

## ABSTRAK

Perjanjian perdamaian Abraham Accords pertama kali diumumkan pada 13 Agustus 2020 oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump di White House. Satu bulan paska pengumuman, Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani Abraham Accords dan secara resmi telah menormalisasi hubungannya dengan Israel. Disusul oleh Maroko dan Sudan empat bulan paska penandatanganan. Dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah membawa perjanjian perdamaian menjadi suatu opsi pilihan mempertahankan keamanan serta menjaga kestabilan kawasan. Dengan menggunakan teori analisis Regional Security Complex Theory, penulis menjabarkan pola-pola pertemanan atau permusuhan yang terjadi di Timur Tengah. Akibat ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini juga, konstalasi perpolitikan di Timur Tengah sedikit banyak mengalami perubahan, terutama terkait dengan distribusi kekuasaan yang semakin jelas terlihat, keberpihakan, dan penekanan Iran di kawasan.

Kata Kunci: Timur Tengah, Israel, Amerika Serikat, Iran

## ABSTRACT

*The Abraham Accords peace agreement was first announced on August 13, 2020 by the then President of the United States, Donald Trump at the White House. One month after the announcement, the United Arab Emirates and Bahrain signed the Abraham Accords and have officially normalized their relations with Israel. Followed by Morocco and Sudan four months after the signing. The security dynamics in the Middle East region have brought the peace agreement into an option to maintain security and maintain regional stability. By using the analysis theory of Regional Security Complex Theory, the author describes patterns of friendship or hostility that occurred in the Middle East. As a result of the signing of this peace agreement, the political constellation in the Middle East has more or less changed, especially related to the increasingly clear distribution of power, partiality, and Iran's emphasis on the region.*

*Keywords: Middle East, Israel, United States of America, Iran*

## Pendahuluan

Kawasan merupakan lempengan luas daratan yang berisi negara-negara, dan cenderung akan membentuk kerja sama dan kelompok. Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang terdiri dari banyak negara di dalamnya. Secara geografis, Timur Tengah terdiri dari 17 negara di dalamnya, yaitu: Algeria, Bahrain, Mesir, Iran, Iraq, Israel, Palestina, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Suriah, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Yaman.

Timur Tengah juga merupakan kawasan dengan segudang 'nilai' di dalamnya. Nilai ini berupa nilai non-materi dan nilai secara materi. Dikatakan memiliki segudang nilai non-materi dikarenakan Timur Tengah menjadi pusat agama dan peradaban beberapa agama dan agama-agama yang lahir di kawasan ini masih eksis hingga saat ini, bahkan tersebar di hampir seluruh dunia. Dalam segi materi yang terdapat di dalamnya lebih banyak lagi. Minyak dan gas bumi, belum lagi hasil pertambangan menjadikan Timur Tengah salah satu kawasan dengan letak paling strategis, bahkan hingga saat ini. (TWB 2019)

Jika dilihat secara garis besar, terdapat tiga hal yang kerap kali dijadikan sebagai alasan kuat konflik di Timur Tengah, hal ini ialah ekonomi, sosial-politik, dan ideologi. (Indriana 2017) Ekonomi yang berasal dari sumber minyak dan gas alam menjadikan Timur Tengah memang wilayah yang sangat diperhitungkan. Hampir dua per tiga kebutuhan minyak dunia didatangkan dari Timur Tengah. Negara-negara di benua Eropa, hampir 70% kebutuhan minyaknya dipenuhi oleh Timur Tengah. Minyak juga menjadi pelumas utama alasan perang Iran dan Irak yang terjadi pada tahun 1980-1988. Selanjutnya pada tahun 1990, Irak menginvasi Kuwait juga dengan alasan yang sama, memperebutkan minyak sebagai sumber daya untuk negara. (Indriana 2017) Kesenjangan ekonomi yang sangat besar juga menjadikan kawasan Timur Tengah memiliki 'kelas' tersendiri dalam pergaulan negara-negaranya. Ibarat *Cheat Code* dalam suatu gim, minyak menjadi pelumas pembangunan tidak hanya untuk kebutuhan dasar warga negara, namun juga sebagai modal kemewahan. Negara-negara terkaya di Timur Tengah, secara berurutan berdasarkan data dari Bank Dunia ialah Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Iraq.(TWB 2019)

Keadaan sosial dan politik di Timur Tengah yang selalu memanas, ibarat gurun pasir di sana, juga menjadi alasan konflik lainnya yang kerap kali terjadi. Terdapat enam suku besar di sana, yaitu: Arab, Yahudi, Parsi, Turki, Kurdi, dan Berber, menjadikan kompleksitas interaksi sosial terjadi. Konflik Arab dan Yahudi, terhitung sejak berdirinya Israel pada 1948 silam. Pada awal-awal tahun berdirinya, keberadaan Israel mendapat kecaman dari negara-negara di Timur Tengah. Dapat dikatakan bahwa Israel menjadi 'musuh bersama' dalam rangka solidaritas terhadap Palestina pada era itu. (Muhammad 2020) Perubahan arah politik di Timur Tengah terang-terangan terjadi saat peristiwa *Arab Spring*. *Arab Spring* merupakan proses demokratisasi yaitu runtuhnya rezim otoriter, pelembagaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan konsolidasi rezim yang demokratis. (Muttaqien 2018) Semi Arab ini dimulai pada tahun 2011. Peristiwa ini awalnya berangkat dari Tunisia, demokratisasi menjalar ke hampir seluruh negara-negara di Timur Tengah. Pengaruh media massa semakin mempercepat laju musim semi ini. Namun, tidak seperti *spring* yang seharusnya indah, dampak yang dihasilkan di negara-negara di Timur Tengah justru tidak seindah namanya. Demonstrasi besar-besaran serta ketidakstabilan politik internal yang menjalar hingga ketidakstabilan perpolitikan regional menjadi dampak nyata yang dihasilkan pasca *Arab Spring*.

Ideologi menjadi alasan ketiga terjadinya konflik-konflik di Timur Tengah. Tiga paham besar di sana ialah Sunni, Syiah, dan Yahudi. Tanah Timur Tengah menjadi dataran munculnya wahyu-wahyu besar beberapa agama. Mayoritas populasi masyarakat Timur Tengah memeluk agama Islam, namun terpecah lagi dalam golongan Syiah dan Sunni. Syiah banyak ditemukan di Iran, dan Sunni banyak ditemukan di negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, dan beberapa negara di sekitarnya. Perpecahan terjadi dikarenakan komposisi penduduk yang sangat

heterogen, ditambah lagi dengan gesekan-gesekan yang diakibatkannya menjadikan ideologi menjadi salah satu bahan bakar konflik yang terjadi di Timur Tengah. (Muttaqien 2018) Keberagaman paham ini tidak justru menjadikan perbedaan yang harmonis dan hal-hal beriringan lainnya. Perbedaan ini justru sering dijadikan sebagai *framing* perpecahan dan konflik, salah satunya perang internal yang terjadi di Suriah pasca *Arab Spring*. Walaupun tidak sepenuhnya pergolakan internal yang terjadi di Suriah diakibatkan oleh perbedaan ideologi keagamaan Islam aliran Sunni dan Syiah, namun sudut pandang yang dihadirkan oleh media kerap kali menampilkan kedua hal tersebut.

Masih dalam konteks ideologi keislaman antara Syiah dan Sunni, hal ini menjadi penebalan ketidakharmonisan antara hubungan dua negara yang cukup diperhitungkan di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi menjadi tanah utama penyebaran Islam Sunni dan Iran menjadi tanah utama bagi Islam Syiah. Iran, dalam kasus ini memiliki posisi yang dapat dikatakan kurang menguntungkan. Hal ini dikarenakan Arab Saudi bersamaan dengan Israel, tanah Yahudi, memiliki hubungan yang cukup baik. Hubungan yang cukup baik ini dikarenakan adanya pengikat dari pihak ketiga, yaitu Amerika Serikat. (Umam N.d) Hubungan antara ketiga faksi besar di Timur Tengah ini, menjadikan Iran sebagai pihak yang dapat dikatakan kurang diuntungkan. Arab Saudi dan Israel, walaupun belum melegalisasi hubungan resmi, mereka memiliki kesamaan yaitu Iran sebagai 'musuh bersama'. Dalam pelebaran sayap kekuasaannya, Israel mulai menjalin hubungan kerja sama secara legal dengan negara-negara di Timur Tengah. Hubungan ini biasanya berupa normalisasi diplomatik yang mengikat dan menjadikan keberadaan Israel semakin diperhitungkan di Timur Tengah

Salah satu hubungan normalisasi diplomatik baru yang dilakukan oleh Israel ialah *Abraham Accords*, merupakan perjanjian normalisasi diplomatik antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. *Abraham Accords* disahkan pada 13 Agustus 2020. Perjanjian ini diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu yaitu Donald Trump. Satu bulan pasca pengumuman, tepatnya pada 15 September 2020, perwakilan Israel yaitu Benyamin Netanyahu yang pada saat itu menjabat sebagai perdana Menteri Israel, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed Al Nahyan, dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani, berkumpul di Gedung Putih, Amerika Serikat, untuk pendatangannya perjanjian. (A. Rizki 2022) Hubungan diplomatik yang sampai pada tahap pengesahan dan adanya perjanjian legal, menandakan bahwa negara-negara tersebut telah menjalin hubungan yang sudah lama. Bentuk pengesahan perjanjian menjadi pertanda bahwa hubungan yang dibangun sudah cukup mapan berdasar hubungan-hubungan sebelumnya. Uni Emirat Arab dan Bahrain bukan yang pertama menjalin hubungan dengan Israel. Sebelumnya pada tahun 1979, Mesir sudah terlebih dahulu menormalisasi hubungannya. Mesir juga menjadi negara pertama di Timur Tengah yang melegalkan hubungan diplomatiknya dengan Israel. Disusul oleh Yordania pada tahun 1994, sehingga Uni Emirat Arab merupakan negara ketiga, dan Bahrain merupakan negara, yang sejauh ini, terakhir menjalin hubungan dengan Israel secara resmi kenegaraan. (R. Wicaksono 2020)

Hubungan yang terjalin hingga pada tahap dilakukannya normalisasi dan pembentukan perjanjian resmi melewati tahap yang sangat lama. Pada awalnya, Uni Emirat Arab sebagai salah satu negara yang terlibat dalam *Abraham Accords* pada mulanya juga turut mengecam Israel, terutama dalam aksinya terhadap Palestina. (R. Wicaksono 2020) Uni Emirat Arab tidak hanya

sekali, namun beberapa kali melakukan kecaman terhadap Israel. Aksi radikal yang salah satunya dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dilihat sebagai bentuk ancaman kestabilan bagi kawasan, dan menjauhkan cita-cita Uni Emirat Arab terhadap kestabilan keamanan kawasan. Perlunya pemeliharaan hubungan antar seluruh negara disinyalir menjadi salah satu cara paling ampuh untuk tercapainya cita-cita kestabilan regional. (R. Wicaksono 2020)

Dilakukannya peresmian hubungan diplomatik kenegaraan ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk ekspansi penyebaran eksistensi Israel di kawasan. Jika sebelumnya negara-negara di Timur Tengah sama-sama menentang keberadaan Israel karena menduduki wilayah negara Palestina, namun era ini eksistensi Israel menjadi 'ada'. Bentuk kerja sama yang ditawarkan oleh Israel juga beragam, termasuk salah satunya kerja sama keamanan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Seperti pemaparan di atas, keamanan Timur Tengah menjadi suatu yang rapuh dan dalam proses penciptaannya, setiap negara harus berkolaborasi untuk mewujudkannya. Bentuk kerja sama yang dibutuhkan ialah kerja sama yang mengikat, yang formal, dan dalam level negara sehingga perwujudan bersama atas apa-apa saja isi perjanjian yang disepakati dapat dilaksanakan. Bentuk normalisasi hubungan diplomatik inilah yang diproyeksikan akan menjadi pondasi kekuatan keamanan Timur Tengah.

## TINJAUAN PUSTAKA

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, jurnal pendukung yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiridari tiga kelompok, yaitu:

- a) *Abraham Accords* dan dampaknya bagi keamanan kawasan Timur Tengah merupakan kelompok pertama yang terdiri dari empat jurnal, yaitu: *The Regional Impact of Abraham Accords*(Yossef 2021) oleh Amr Yossef; *The Abraham Accords: Paradigm Shift or Realpolitik?*(Norlen and Sinai 2020) Oleh Tova Norlen dan Tamir Sinai; *Causes behind the Abraham Accords and its consequences for the Peace Process in the Middle East*(Aziz Ur Rehman 2020) oleh Aziz Ur Rehman; dan *Normalisation and Realignment in the Middle East*(Muriel Asseburg and Sarah Ch Henkel 2021) oleh Muriel Asseburg dan Sarah CH. Henkel. Keempat jurnal ini menangkap peristiwa yang bisa dikatakan memiliki kemiripan satu sama lain, yaitu dinamika hubungan negara-negara di kawasan dan pengaruhnya terhadap keamanan regional. *Abraham Accords* menjadi penanda bahwa negara-negara terlibat sudah berada pada pemahaman yang sama, dan memiliki visi dan misi yang sama, yaitu ekonomi dan kestabilan keamanan kawasan. Pembentukan perjanjian ini secara langsung menjadi validasi bahwa negara-negara terlibat berada pada kelompok yang sama. Kelompok yang dimaksud adalah Israel dengan Negara-Negara Teluk.
- b) Kelompok penelitian terdahulu kedua ialah terkait dengan Faktor-faktor alasan terlaksananya *Abraham Accords* dari sudut pandang negara-negara yang terlibat. Dalam kelompok bahasan ini, penulis menggunakan tiga referensi jurnal terdahulu yaitu *Analisis Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab Dalam Normalisasi Hubungan dengan Israel*(Tahmi et al. 2022) oleh A Rizki Tahmi, Mohamad Rosyidin, dan Muhammad Faizal Alfian; *Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel: Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina*(R. M. T. A. D. Wicaksono 20202) oleh Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono; dan *Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya dengan Israel*(R. Wicaksono 2020) oleh penulis yang

sama dengan sebelumnya, Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono. Ketiga jurnal ini, dengan fokus pembahasan Uni Emirat Arab dan hubungan resmi barunya dengan Israel, banyak membahas alasan-alasan kuat terjadinya hubungan normalisasi ini. Normalisasi yang dilakukan oleh UEA dan Israel, secara mendasar memiliki alasan kuat kepentingan negara masing-masing negara dalam bidang: politik, militer, dan ekonomi. Dalam bidang politik, Israel butuh pengakuan bahwa dia adalah sebuah negara yang memang 'ada' keberadaannya. Validitas eksistensi ini sangat penting bagi Israel, terutama di negara-negara di Timur Tengah. Dalam bidang keamanan, UEA menjadi negara yang lebih membutuhkan Israel. Ancaman Iran di kawasan menjadi alasan utama UEA membentuk aliansi dengan Israel dengan tingkat kekuatan militeristik yang lebih mumpuni. (R. Wicaksono 2020)

- c) Kelompok penelitian terdahulu ketiga yang penulis masukkan ialah terkait dengan 'Konflik dan Keamanan di Kawasan Timur Tengah'. Jurnal-jurnal yang penulis paparkan secara garis besar membahas tentang konflik-konflik yang pernah terjadi atau masih terjadi serta penyebab dari ketidakstabilan keamanan kawasan Timur Tengah. Jurnal-jurnal yang penulis gunakan dalam kelompok ini ialah: *Introducing Regional Security in the Middle East*(Bilgin 2019) oleh Bettina Koch dan Yannis A. Stivachtis; *Rivalitas Arab Saudi, Iran, dan Israel di Kawasan Timur Tengah*(Umam, n.d.) oleh Khotibul Umam; *Dinamika Keamanan Kawasan Timur Tengah dalam Persaingan Kekuatan Iran dan Amerika Serikat*(Irawan 2021) oleh Deni Irawan; *Memetakan Konflik di Timur Tengah (Tinjauan Geografi Politik)*(Ruslin 2013) oleh Ismah Tita Ruslin; *Konflik Sunni-Syiah Pasca Arab Spring: Menelusuri Motif Politik dibalik Perang Berkepanjangan di Suriah*(Tasnur and Wati 2019) oleh Irvan Tasnur; *Ideologi: Faktor Konflik dan Kegagalan Timur Tengah*(Muttaqin 2018) oleh Muhammad Zainal Muttaqin; dan *Pemetaan Konflik di Timur Tengah*(Indriana 2017) oleh Nilna Indriana.
- d) Selanjutnya ialah dokumen asli perjanjian perdamaian Abraham Accords yang didapat melalui web resmi State Department. Dalam web tersebut dokumen resmi dari perjanjian awal, hingga joint statement terpaut lengkap dan penulis gunakan untuk bahas analisis dan peninjauan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian pada tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami, dan menafsirkan sebuah perilaku interaksi sosial. Berusaha untuk mendapatkan makna, proses, dan konteks sebuah perilaku atau peristiwa sosial yang sedang diamati. Pendalaman wawasan dan kepekaan menjadi modal awal bagi penulis agar dapat menangkap makna yang tersirat di balik setiap fenomena sosial yang terjadi. (Bakry 2016) Penelitian kualitatif bertaruh kuat pada pengumpulan data dan strategi atau teknik analisis data yang digunakan dan dielaborasi penulis dalam tulisannya. Sehingga penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai teknik penelitian yang intuitif serta sistematis, peneliti banyak menggunakannya untuk menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren. (Bakry 2016)

Penelitian kualitatif dekriptif menekankan pada penjabaran data-data yang ada dan menyampaikan di tulisan apa adanya. Kualitatif dekriptif berusaha untuk menggambarkan,

menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan atas fenomena yang diangkat. Pemaparan data ini juga disertai dengan pemahaman mendalam dari penulis, dekripsi yang menampilkan sudut pandang penulis yang disorot tajam sehingga arah tulisan, walau hanya dideskripsikan, memiliki fokus utama. (Bakry 2016) Menjelaskan fenomena dengan pemaparan informasi yang bersifat faktual dan aktual, serta mengidentifikasi masalah-masalah atau menjustifikasi praktek yang sedang berlangsung menjadi tujuan utama dari penelitian kualitatif deskriptif. (M. Arsyam 2020).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang banyak digunakan ialah penelitian berbasis internet dan penelitian berbasis dokumen atau arsip. Penelitian berbasis internet digunakan untuk mendapatkan berita-berita terbaru, artikel jurnal ilmiah, buku elektronik, serta laporan-laporan terbaru yang bersinggungan atau memiliki korelasi dengan penelitian penulis. Namun, dalam proses pemilihan data yang akan dimasukkan pun melalui seleksi kembali. Terutama terkait dengan korelasi dan kredibilitas dari tulisan yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan. Teknik pengumpulan data seperti yang telah dipaparkan di atas disebut sebagai teknik *Library Research* atau studi pustaka. Studi pustaka sebagian besar terdiri dari data sekunder, seperti jurnal-jurnal ilmiah atau buku elektronik, namun juga memiliki data primer seperti dokumen langsung perjanjian, serta kesepakatan yang dibuat dan dituangkan dalam bentuk dokumen digital. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari dokumen *Abraham Accords*, sedangkan data sekunder ialah jurnal, artikel, serta buku elektronik yang membahas tentang fenomena yang sedang penulis teliti.

## KERANGKA PEMIKIRAN

Tulisan ini menggunakan teori penjabaran dan analisis *Regional Security Complex Theory*. *Regional Security Complex Theory* merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan perkembangan negara di kawasan dan merupakan teori keamanan regional yang memungkinkan untuk menganalisa suatu negara dan pengaruhnya terhadap regional. Membahas tentang keamanan, hal pertama yang harus dihadapi adalah koneksi-koneksi yang tidak terlihat dan hubungan-hubungan di bawah arus utama yang dihadapi dan dijalani. Keamanan suatu negara, tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh arus keamanan negara lainnya, baik itu pengaruh negara-negara adidaya atau pun negara-negara di sekitarnya, atau negara kawasan. Dalam pengertian keamanan, kawasan diartikan sebagai subsistem hubungan keamanan antara negara-negara yang secara takdir berada pada satu kawasan geografi yang berdekatan antar satu sama lain. (Buzan 2016)

Keamanan regional membawa kita pada level analisis antara sistem yang ada dan negara persatuan; keamanan yang memang dipengaruhi oleh sistem yang ada, keteritikan negara satu dengan negara lainnya, dan juga hubungan-hubungan yang terbentuk selama bertetangga. Dalam kawasan, cenderung terjadi yang namanya perimbangan kekuasaan, terutama dalam tataran lokal kawasan saja. Namun, perkembangan dinamika hubungan internasional, membawa hubungan negara-negara di dunia, hal ini menjadi sedikit kabur karena ide perimbangan kekuasaan secara lokal kerap kali tidak sesederhana itu. Adanya kekuatan-kekuatan besar di dunia, lebih besar dari yang ada di kawasan, dan dapat memengaruhi kekuatan keamanan kawasan menjadi persoalan hubungan keamanan lainnya. (Buzan 2016) Perimbangan kekuasaan di kawasan *periphery* memang tidak sekuat yang ada di kawasan pusat.

Dalam mendefinisikan keamanan regional, prinsip elemen yang harus ada ialah pola *amity* dan *enmity* di antara negara-negara. *Amity* diartikan sebagai hubungan yang berdasarkan pertemanan dan persahabatan negara-negara, ekspektasi untuk bisa saling melindungi atau menjadi *support* satu sama lain. *Enmity* diartikan sebagai hubungan yang berlandaskan kecurigaan dan ketakutan. (Buzan 2016) Dalam melihat hubungan negara-negara di kawasan, pola ini cukup berguna untuk memetakan siapa bersama siapa, atau siapa bermusuhan dengan siapa, atau mungkin melihat siapa yang justru tidak bersama siapa-siapa. Terkadang, *amity* dan *enmity* tipis terlihat atau terlalu terlihat, terkadang juga bercampur karena aspek negara yang sangat kompleks untuk melihat pola hubungan kecenderungan dengan siapa saja sehingga melihat secara jelas pola yang ada dengan negara-negara cukup sulit dilakukan. *Amity* dan *enmity* juga merupakan pola yang digunakan dalam teori perimbangan kekuasaan jika merujuk pada pandangan yang lebih ekstem, sehingga hal ini berkaitan. Pola *amity* dan *enmity* sedikit banyak memiliki kesamaan dengan perimbangan kekuasaan, pola ini lebih kental ada pada perimbangan kekuasaan dibandingkan dengan distribusi kekuasaan. Pola *enmity*, dalam segi historis memiliki pengaruh lebih besar dikarenakan permusuhan yang sudah mengakar cenderung lebih menentukan sikap suatu negara, terutama jika sejarah berkaitan dengan masyarakat. (Buzan 2016)

Dua komponen kunci dalam RSCT ialah pola *amity* dan *enmity* serta pembagian kekuasaan (*distribution of power*) antar negara-negara utama. Untuk menganalisis pembagian kekuasaan, logika yang digunakan ialah sama dengan logika menganalisis polaritas keseluruhan sistem yang ada. (Buzan 2016) Pembagian kekuasaan diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pembagian kekuasaan yang diakibatkan oleh faktor internal ialah seperti adanya disintegrasi pada suatu negara di kawasan. Namun, disintegrasi yang terjadi pun dapat memengaruhi sistem pembagian kekuasaan jika fenomenanya dalam skala yang cukup besar. Pembagian kekuasaan juga dapat diakibatkan oleh faktor eksternal. Kekuatan eksternal dapat merubah kekuatan internal dengan dua acara: ikut bergabung jika kedekatan antara mereka sangat kuat; dan/atau membuat keberpihakan di dalamnya sehingga kompleksitas dinamika pembagian kekuasaan di regional akan lebih tinggi. (Buzan 2016)

Kekuatan eksternal dapat dengan mudah memengaruhi pembagian kekuasaan di regional apalagi jika dalam prakteknya kekuatan eksternal menggunakan suplai senjata, atau justru keikutsertaan langsung dalam kekuatan bersenjata negara-negara yang dipihak. RSCT melihat bahwa pembagian kekuasaan sangat mungkin membentuk perjanjian keberpihakan antara mereka. Jika pola *amity* dan *enmity* menyibak seluruh hubungan antar negara dalam suatu kawasan, pembagian kekuasaan justru kerap kali menyelesaikan satu bentuk hubungan perselisihan dan juga membuka perselisihan lain yang bisa saja berskala lebih besar dengan intensitas yang lebih dalam. (Buzan 2016)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a) Dinamika Keamanan Timur Tengah**

Timur Tengah merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk lokasi yang berada di persimpangan antara Eropa, Asia, dan Afrika, serta Laut Mediterania dan Laut India. (KOCH and STIVACHTIS 2011) Timur Tengah berada di lokasi yang unik dan strategis. Dalam sejarah, lokasi

ini merupakan regional yang kompleks, dikarenakan selalu menarik perhatian kekuatan-kekuatan besar dan selalu ikut serta dalam setiap permasalahan global dikarenakan lokasinya yang strategis. Timur Tengah juga menjadi tempat lahirnya kepercayaan-kepercayaan besar Kristen, Yahudi, dan Islam. Sejak keberadaan sumber daya alam yang ada di Timur Tengah terkuak oleh dunia barat, terutama kandungan minyak bumi dan gas alamnya yang sangat melimpah, nasib Timur Tengah menjadi semakin diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. (Bilgin 2019)

Namun, sebelum beranjak pada skema keikutsertaan kekuatan-kekuatan besar yang berasal dari luar regional Timur Tengah, perlu diperhatikan bahwa internal Timur Tengah juga merupakan kumpulan negara-negara yang membentuk dinamika keamanan yang terjadi di sana. Negara-negara yang berada di kawasan ini menjalin hubungan *passive-aggressive* selama bertetangga. Penulis menggunakan rentang waktu sejak tahun 1940an hingga hari ini untuk melihat dinamika keamanan yang terjadi antar negara-negara di kawasan. Tahun 1940an dipilih karena tahun-tahun ini merupakan era awal banyak negara di Timur Tengah resmi merdeka dan Perang Dunia II pun sudah resmi usai. Pasang surut hubungan yang terjadi antara negara-negara di Timur Tengah ini diakibatkan oleh dinamika konflik yang terus berubah. Hal ini juga menjadi alasan pemaparan setiap fenomena yang terjadi di Timur Tengah berdasarkan dengan waktu terjadinya. Setiap fenomena yang membentuk hubungan keberpihakan atau permusuhan baru menjadi poin utama yang ingin dipaparkan. Beberapa negara awalnya membentuk suatu kelompok untuk menyerang atau mempersekusi negara atau kelompok lain. Namun dalam perkembangannya, justru bagian dari kelompok ini menjalin hubungan bilateral dengan negara yang awalnya diserang. Dinamika juga terjadi seturut dengan perubahan-perubahan di dalam suatu negara yang dapat memengaruhi sekitarnya, misalnya revolusi. Perang antar negara di kawasan juga menjadi salah satu akibat dari dinamika yang terus berubah. Perebutan batas wilayah, perebutan sumber daya alam, gesekan ideologi, menjadi alasan-alasan berulang yang memicu konflik di Timur Tengah. Pengaruh dari kekuatan luar juga bukan menjadi suatu hal yang dapat dikecualikan sebagai alasan utama konflik-konflik di Timur Tengah. Pengaruh negara-negara adidaya yang ikut campur di kawasan, mengakibatkan dinamika konflik semakin susah diuraikan. Pola-pola hubungan yang terbentuk juga tidak bergerak secara pasif, namun bergerak membentuk jalinan hubungan yang bertumpuk akibat lapisan identitas yang kuat antara masing-masing negara. (KOCH and STIVACHTIS 2011)

Dilakukannya tiga normalisasi hubungan dengan Israel dan diisi oleh lima negara di kawasan Timur Tengah membuktikan bahwa legitimasi keberadaan Israel sebagai sebuah negara adalah sah adanya. Pasang surut hubungan yang terjadi di kawasan Timur Tengah, terhitung sejak tahun 1940an, membuat dinamika konflik yang sangat fluktuatif. Hampir setiap dekade, selalu ada perubahan baru yang terjadi baik dari konflik atau justru hubungan normalisasi. Konflik-konflik yang terjadi, melibatkan aktor-aktor dalam lingkup regional mau pun hingga melibatkan aktor di luar kawasan Timur Tengah. Pola *amity* dan *enmity* yang terjalin pun akan lebih rumit karena fluktuasi yang selalu terjadi. Pada era-era awal 1940an, negara-negara arab membentuk pola *amity* yang kuat, terutama berasal dari kelompok-kelompok negara Islam. Hal ini didasari pada rasa bela Palestina yang saat itu wilayahnya dimasuki dan berusaha diduduki oleh kaum Yahudi. (Fauziyah 2014) Pola *enmity* kuat terbentuk antar negara-negara Arab dan kaum Yahudi, atau Israel. Pergempuran terus menerus yang dilakukan warga Arab yang membela Palestina,



terhadap Israel mengakibatkan hubungan yang terbentuk semakin kuat membenci satu sama lain. Permusuhan ini juga tidak hanya bersala dari peristiwa pendudukan Israel terhadap Palestina, namun dimulai dari sejarah panjang negara-negara di Timur Tengah. (Fauziyah 2014)

Masuk pada 1979 ketika revolusi Iran terjadi. Iran sebagai sebuah negara di Timur Tengah menjadi salah satu yang menentang akan keikutsertaan Amerika Serikat di kawasan. Amerika memiliki hubungan baik dengan negara-negara Arab, khususnya Negara-Negara Teluk. (Washington 2008) Amerika sangat ikut campur, terutama dalam hal pemasaran minyak, ketika harga sudah mulai dimonopoli dan Amerika dapat menentukan itu. Keberpihakan Amerika terhadap pemimpin terdahulu, yaitu Shah juga semakin memperkuat alasan Iran memiliki ketidaksukaan terhadap campur tangan Amerika di negaranya, termasuk di kawasan. (Irawan 2021) Revolusi Iran membawa Iran menghadapi Iraq pada Perang Teluk I. Perang Teluk I dilandaskan dengan pembatalan perjanjian dan perebutan wilayah di antara kedua negara yang memiliki sumber daya minyak yang melimpah. Serangan Iraq juga diakibatkan oleh melemahnya kondisi Iran paska revolusi. Pola *enmity* terbentuk dari tindakan Iraq melawan Iran. Hal menarik dari Perang Teluk I juga ialah bantuan Amerika Serikat terhadap Iraq yang membentuk pola *amity* antara mereka. Namun, hubungan ini merenggang bahkan putus dimulai dari Perang Teluk II dan invasi Amerika Serikat ke Iraq. (Published 2012)

Surutnya konflik, dan pembentukan perjanjian normalisasi hubungan juga menjadi pola baru yang muncul di Timur Tengah. Jika sebelumnya Mesir dan Yordania membentuk *enmity* karena kebencian terhadap bangsa Yahudi karena berusaha menduduki wilayah Palestina, pada tahun 1979 Mesir membentuk hubungan bilateral resmi dengan Israel, disusul dengan Yordania pada tahun 1994. (Maros and Juniar 2016) Hubungan yang berubah secara signifikan ini menandakan dinamika keamanan kawasan yang terus berubah di kawasan Timur Tengah. Pola *amity* dan *enmity* yang rumit juga ditunjukkan pada Perang Suriah. Dua kelompok pada satu negara, yaitu pemerintahan dan kelompok oposisi. Kelompok pemerintahan Suriah mendapat bantuan langsung dari Iran dan Russia, melawan bantuan yang diberikan oleh Turki dan Amerika Serikat, serta beberapa negara Arab untuk kelompok oposisi. (Syarif Bahaudin Mudore and Nurlaila Safitri 2019) *Amity* dan *enmity* yang terbentuk pada lingkup perang pada satu negara saja sudah memperlihatkan tumpukan hubungan yang kuat. Pengelompokan hubungan semakin nampak ketika *Abraham Accords* disahkan. Kecenderungan mewujudkan cita-cita perdamaian di kawasan dengan cara yang berbeda semakin terlihat.

Perubahan arah politik 'Musuh Bersama' terjadi di Timur Tengah. Pada era-era awal, Israel merupakan negara yang diperangi karena mengganggu eksistensi negara salah satu dari mereka, yaitu Palestina. Namun, hal itu tidak diperkuat lagi. Keberpihakan negara-negara Arab dengan Israel merupakan manifestasi keberpihakan mereka terhadap Amerika Serikat. Iran menjadi ancaman baru di kawasan, dan keberadaannya cukup mengganggu negara-negara sekitarnya. Mengganggu diartikan sebagai keberadaannya yang memiliki kekuatan militer yang mumpuni, ditambah lagi keberadaan senjata nuklir yang semakin menebalkan perimbangan kekuasaan dan perimbangan kekuatan di Timur Tengah. Negara-negara Arab lebih berpihak ke Israel dengan hubungan-hubungan lain yang terbangun, misalnya ekonomi dan kestabilan politik. Dengan model perjanjian yang telah dilakukan oleh Mesir dan Yordania, gejolak konflik atas negara-negara yang terlibat dalam perjanjian hubungan bilateral resmi dapat dikatakan lebih nihil untuk menyerbu satu sama lain, dengan kata lain, menjadi salah satu tangga menuju kestabilan

keamanan kawasan Timur Tengah. Model perjanjian perdamaian dengan menormalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara dengan Israel juga terjadi lagi pada akhir tahun 2020. Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel. Langkah ini, sama dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya, dianggap sebagai langkah mewujudkan cita-cita perdamaian dan kestabilan kawasan Timur Tengah; perjanjian ini dinamakan sebagai *Abraham Accords*.

#### **b) Inisiasi *Abraham Accords***

*Abraham Accords* atau Perjanjian Abraham merupakan perjanjian normalisasi hubungan diplomatik resmi antara Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan dengan Israel. (Muriel Asseburg and Sarah Ch Henkel 2021) Perjanjian ini dimulai dengan pengumuman pada 13 Agustus 2020 bahwa sudah ada kesepakatan bernama *Abraham Accords*, disampaikan langsung oleh Donald Trump yang merupakan presiden Amerika Serikat saat itu sekaligus pihak ketiga yang menjadi mediasi terlaksananya *Abraham Accords*. (Muriel Asseburg and Sarah Ch Henkel 2021) Satu bulan setelah pengumuman, tepatnya pada 15 September 2020, Uni Emirat Arab yang diwakili oleh Presiden Khalifa bin Zayed al Nahyan, Bahrain yang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya Abdullatif bin Rashid al-Zayani dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani *Abraham Accords* di White House Amerika Serikat. (R. M. T. A. D. Wicaksono 2020) Selanjutnya, *Abraham Accords* juga ditandatangani oleh Maroko pada 22 Desember 2020, dan oleh Sudan pada 6 Januari 2021. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini oleh Sudan, maka genap sudah empat negara di Timur Tengah dan Afrika yang terlibat dalam normalisasi hubungan dengan Israel. (Muriel Asseburg and Sarah Ch Henkel 2021)

Dalam penandatanganan perjanjian ini, negara-negara yang terlibat memiliki alasan-alasannya masing-masing terkait dengan jenis kepentingan apa yang mereka usahakan dengan melakukan kerja sama dan normalisasi hubungan bilateral dengan Israel. Negara-negara yang berada di Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko menandatangani perjanjian ini dengan alasan melanjutkan rencana normalisasi yang sudah dicanangkans sejak 1990. Namun, dengan banyaknya tantangan dan pergolakan yang terjadi pada era itu, maka normalisasi sempat ditunda. (Muriel Asseburg and Sarah Ch Henkel 2021) Baru pada tahun 2020, ketika keamanan kawasan dirasa cukup stabil, perjanjian diumumkan dan ditandatangani. Negara-negara yang terlibat juga sebagian besar sebelumnya tidak pernah terlibat dalam perang melawan Israel. Kecuali Maroko yang berperang melawan Israel dalam rangka bela Palestina pada 1973 silam. (Yossef 2021)

- **Uni Emirat Arab**

Negara-negara yang terlibat, seperti yang sudah disampaikan di atas, memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri dalam melakukan normalisasi. Uni Emirat Arab sebagai negara pertama penandatanganan *Abraham Accords*, telah sejak lama menjalin hubungan baik dengan Israel. Perjanjiannya dengan Israel dalam *Abraham Accords* ini banyak menekankan pada kerja sama bidang ekonomi, keamanan wilayah, militer dan persenjataan, serta mewujudkan cita-cita kestabilan kawasan Timur Tengah. (Tahmi et al. 2022) Uni Emirat Arab dan Israel menyetujui untuk meningkatkan pembangunan dalam bidang ekonomi dan diplomatik bilateral secara penuh. Hubungan bilateral yang dimaksudkan dititikberatkan pada investasi, pariwisata, penerbangan

langsung, keamanan, kedutaan, dan beberapa persetujuan lainnya. Tidak hanya antara Uni Emirat Arab dan Israel, perjanjian ini juga termasuk persetujuan dengan Amerika Serikat terkait dengan memperluas kerja sama diplomatik, perdagangan, dan keamanan. Rencana ekspansi Israel ke West Bank juga ditunda; dan yang terakhir ialah memberikan hak warga UEA untuk beribadah dan mengunjungi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. (Tahmi et al. 2022)

- Bahrain

Negara kedua yang melakukan kerja sama dengan Israel ialah Bahrain. Di hari yang sama dengan Uni Emirat Arab, Bahrain menandatangani perjanjian *Abraham Accords*. Tidak seperti Uni Emirat Arab yang sangat merencanakan dan terkait dengan perjanjian ini Bahrain justru cenderung 'disokong' oleh Saudi untuk melakukan kerja sama antara Bahrain dan Israel. (Muriel Asseburg and Sarah Ch Henkel 2021) Namun, jika diuraikan bersamaan dengan Uni Emirat Arab, alasan Bahrain menyetujui dan ikut serta dalam perjanjian ini ialah karena sepahaminya negara ini tentang hegemoni Iran di kawasan yang semakin tidak terkendali. Kubu anti Iran ini juga diisi oleh Arab Saudi yang belum menormalisasi hubungannya dengan Israel walau pun dalam praktek bernegara sudah menunjukkan sedikit banyak ikatan. (Institution 2020) Dalam sumber lain juga dipaparkan bahwa alasan utama normalisasi hubungan yang dilakukan oleh Bahrain ialah untuk mendekatkan diri ke Amerika Serikat. Artinya, Bahrain tidak terlalu memiliki ketertarikan dengan Israel, namun lebih ke pada Amerika Serikat. Bahrain melihat normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat dapat menjadi penguat kedudukannya di Washington, terutama di antara negara-negara pro-Israel. (Alhadid, n.d.) Namun, ketidaktertarikan Bahrain atas Israel tidak serta merta membatasi hubungan mereka. Bahrain menggunakan normalisasi hubungan diplomatik ini sebagai langkah meningkatkan kapasitas teknologi, terutama di bidang militer dan keamanan. Dimulai dari *Pegasus Spyware* yang digunakan oleh Bahrain untuk melawan perlawanan aktivis politik dan keamanan internal terhadap pemerintahan monarki. Seperti yang dikatakan Menteri Dalam Negeri Bahrain ketika *Abraham Accords* ditandatangani, bahwasanya normalisasi ini juga digunakan untuk melindungi keamanan internal Bahrain dari bahaya Iran di kawasan Timur Tengah. (Alhadid, n.d.)

- Maroko

Negara ketiga yang menandatangani *Abraham Accords* ialah Maroko. Maroko menandatangani perjanjian normalisasi bilateral dengan Israel dengan rentang waktu empat bulan paska Uni Emirat Arab dan Bahrain. Tepatnya, Maroko menandatangani *Abraham Accords* pada 22 Desember 2022. Dalam perjanjian ini, Maroko mendapatkan kedaulatan penuh atas Sahara Barat dan janji akan resolusi bersama penyelesaian konflik di sana, sesuai dengan rencana Maroko. Tidak hanya Amerika Serikat, namun juga Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Yordania membuka kantor Konsulat di Sahara Barat. Janji yang diberikan Amerika Serikat juga termasuk dalam memasok drone dan senjata presisi lainnya untuk Maroko, ditambah bantuan investasi yang menjanjikan bagi pembangunan di Maroko. (Muriel Asseburg and Sarah Ch Henkel 2021)

- Israel

Israel sebagai negara yang turut masuk dalam perjanjian ini, pun merupakan pemeran utama, memiliki kepentingan-kepentingan yang memiliki irisan dengan negara-negara yang

menjalin kerja sama dengan Israel. Doktrin Netanyahu yang mengatakan “*Peace for peace, and peace through strength*” telah menjadi asas dasar dilaksanakannya perjanjian ini. Sama dengan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab yang juga mengusung premis serupa dengan apa yang dikatakan oleh Netanyahu. Perjanjian ini juga merepresentasikan kepentingan politik luar negeri negara-negara yang terlibat di dalamnya. Dalam ranah politik internal Israel, Netanyahu melihat perjanjian ini sebagai pencapaian pribadinya selama menjadi Perdana Menteri, yang dimana kedua lawannya sulit untuk dapat melakukan hal serupa. (Norlen and Sinai 2020) Penundaan aneksasi yang akan dilakukan ke Tepi Barat ini juga menjadi salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Israel, pun juga Amerika Serikat. Dalam proses penundaan ini, Amerika Serikat dapat mengkategorikan ini menjadi sebuah *Peace Plan*, dan menghindari kehancuran persona bagi Israel jika melakukannya.

Doktrin luar negeri yang dilayangkan Netanyahu atas perjanjian ini juga bersamaan dengan perhatiannya terhadap ancaman yang dilakukan oleh Iran, dan Amerika Serikat juga membantu Israel dalam melawan ancaman ini. Donald Trump saat menjadi orang nomor satu di Amerika, memiliki kebijakan konfrontasi terhadap Iran yang dinamakan dengan *Iran Nuclear Idea Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA). (Katzman, McInnis, and Thomas 2021) Dalam pelaksanaan JCPOA, Netanyahu menyetujui rencana ini. Setelah perjanjian yang terjalin, Israel berhasil ‘memindahkan’ militer Israel tepat di depan pintu masuk wilayah negara-negara Arab. (Norlen and Sinai 2020) Perjanjian antara Uni Emirat Arab dan Bahrain juga menjadi tanda bahwa Israel semakin dekat dengan Saudi Arabia. Kedua negara ini, bukan menjadi rahasia bahwa memiliki ikatan-belum-terlihat dalam menghadapi Iran di kawasan. Hubungan antar kedua negara ini juga nampak ketika Arab Saudi memiliki ketertarikan di bidang militer dan kerja sama intelijen. (Norlen and Sinai 2020)

- Amerika Serikat Sebagai Pihak Ketiga

Amerika Serikat bukan kali pertama menjadi penengah atas perjanjian yang terjadi di Timur Tengah. Pada perjanjian sebelumnya, Israel dengan Mesir dan Israel dengan Yordania, Amerika Serikat turut andil di dalamnya. Membentuk perjanjian antara negara-negara di Timur Tengah dan turut terlibat di dalamnya bukanlah hal yang mudah. Donald Trump melihat ini, walau dengan proyeksi politik luar negerinya yang agresif, tetap menjadi suatu pencapaian untuknya. (Norlen and Sinai 2020) Perjanjian damai antar negara-negara yang terlibat, banyak mendapat kritik bahwa ini bukanlah sebuah perjanjian perdamaian yang bersikap ‘damai’, namun lebih kepada perjanjian politis dan ekonomi. Berkaca dari dua perjanjian damai sebelumnya, perjanjian hanya masuk dalam sektor pemerintahan dan diplomasi. Namun, dalam skala akar rumput, normalisasi tidak pernah dirasakan oleh masyarakat. (Norlen and Sinai 2020)

Amerika Serikat menjadi pengikat antara negara-negara di Timur Tengah yang terlibat dalam perjanjian perdamaian ini. Keikutsertaan Amerika ini beberapa kali ditafsirkan sebagai bentuk hegemoni baru dan kontrol atas negara-negara di Timur Tengah, terutama dalam bidang ekonomi dan persenjataan. Keikutsertaan Amerika di kawasan Timur Tengah ini juga berlandaskan pada Iran dan senjata nuklirnya. Tidak ada lagi negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki nuklir selain Iran, dan Amerika datang dengan alasan kuat agar perimbangan kekuasaan terjadi di kawasan. Usaha-usaha Amerika untuk meredam pengembangan nuklir di Iran juga dilakukan, termasuk pemberian sanksi-sanksi. Karena kepentingan Amerika di kawasan

terhadap Iran inilah terjadinya perjanjian normalisasi diplomatik merupakan salah satu angin segar bagi Amerika. Uni Emirat Arab, Bahrain, disusul oleh Maroko dan Sudan yang melakukan kerja sama dan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel juga sekaligus mendukung strategi politik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. (Aziz Ur Rehman 2020) Menjalin hubungan diplomasi antar negara-negara Arab dan Israel merupakan agenda utama, terutama terkait dengan konsolidasi melawan hegemoni Iran di kawasan, dan bukan tidak mungkin mewujudkan perdamaian mutlak antar Israel dan Palestina. (Aziz Ur Rehman 2020)

### **c) Dampak Abraham Accords Terhadap Dinamika Keamanan Kawasan Timur Tengah**

- **Militer dan Persenjataan**

fokus perjanjian dengan cita-cita keamanan kawasan juga memiliki bentuk yang sedikit banyak berubah paska dilakukannya normalisasi. Untuk mencapai stabilitas dan keamanan kawasan yang dicita-citakan bersama, paska *Abraham Accords*, negara-negara yang terlibat memang terlibat dalam aksi nyata, salah satunya terkait dengan peningkatan mutu dan teknologi dalam bidang militer. Pada November 2021 silam, satu tahun paska ditandatanganinya *Abraham Accords*, angkatan laut dari Bahrain dan Uni Emirat Arab, untuk pertama kalinya mengadakan latihan militer bersama dengan Israel dan dikoordinasikan langsung oleh Amerika Serikat. Mereka melakukan latihan militer ini di Laut Merah. Tujuan dari dilakukannya latihan militer gabungan ini ialah untuk menangkis senjata, ancaman teroris dan perompak, serta bersiaga untuk angkatan laut Iran. (Saab 2022) Tidak hanya dalam angkatan laut, angkatan udara, terutama misil pertahanan juga terjadi kerja sama antar Negara-Negara Teluk dan Israel. Kedua pihak memiliki perhatian yang sama dan waspada terhadap misil pertahanan Iran. Fokus pembangunan dalam kerja sama yang dilakukan oleh Negara-Negara Teluk dan Israel ialah untuk melawan, namun juga membentuk pertahanan terhadap senjata Iran.(Saab 2022)

Israel memprioritaskan program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensi. Memang ancaman *proxy* atau ancaman misil cukup menakutkan bagi Israel. Namun perhatian khusus diberikan terhadap program nuklir karena nuklir di bawah rezim yang bagi Israel merupakan rezim radikal dan tidak mengakui keberadaannya adalah skenario terburuk yang bisa dihadapinya di kawasan. Berbeda dengan Israel yang menitikberatkan fokusnya pada senjata, Negara-Negara Teluk lebih menaruh perhatian terhadap politik Iran di kawasan. Negara-Negara Teluk mengetahui bahwa Iran memiliki senjata nuklir. Namun, menurut mereka urusan itu adalah urusan Amerika Serikat dan negara-negara adidaya lainnya. Kesamaan tujuan dan musuh bersama antara dua kubu ini menjadi salah satu alasan lahirnya *Abraham Accords*. Israel sendiri juga sedang mengembangkan salah satu teknologi militer terbaik. Dengan adanya *Abraham Accords* ini menjadi pelumas pembangunan kerja sama, terutama dalam bidang militer antara negara-negara yang terlibat dalam perjanjian. Peningkatan kemampuan militer ini dilakukan dengan cara impor serta usaha mengembangkan industri militer lokal agar terciptanya swasembada dalam bidang militer dan persenjataan.(Ningthoujam 2022)

- **Konflik Israel dan Palestina**

Konflik antara Israel dan Palestina yang hampir setiap dekadanya selalu menunjukkan letupan baru tidak dapat terelakkan. Israel menjadi pemain utama dalam pembentukan *Abraham*

*Accords* dikarenakan normalisasi bertautan dengannya. Normalisasi yang melibatkan negara-negara yang tidak berbatasan wilayah langsung dengan Israel ini, pun juga tidak terkait dengan kuantitas pengungsi Palestina yang menetap di wilayah mereka, perjanjian ini memang ditujukan untuk memperkuat keamanan secara militer dan persenjataan, menekan Iran di kawasan, dan juga peningkatan perekonomian dan teknologi sipil. (Massimiliano Fiore 2020) Menjadi pertanyaan ialah, Israel yang membentuk perjanjian perdamaian dengan negara-negara Arab, namun juga sebagai pelaku dalam konflik tanpa akhir bersama dengan Palestina. Seperti koin, Israel menunjukkan dua sisi yang berlawanan dan keduanya ialah fakta yang sedang terjadi di kawasan.

Bagian baru dari sejarah dinamika konflik yang ada di Timur Tengah ini menjadikan Palestina yang pada era 1940an hingga 1980an masih menjadi penyatu negara-negara Arab, justru merasa disisihkan paska perjanjian perdamaian ini dibuat. Idealnya, *Abraham Accords* dapat menjadi jembatan pemenuhan cita-cita bersama di kawasan terkait perdamaian, begitu pula dengan konflik antara Israel dan Palestina. (Baqai and Mehreen 2021) Palestina dapat bereaksi pada perjanjian perdamaian ini dengan memberikan reaksi atas penghianatan negara-negara Arab dan memanfaatkan situasi yang ada atau justru bersikap lebih radikal dan memanfaatkan atensi dunia internasional terhadap mereka. (Massimiliano Fiore 2020) Namun, reaksi yang diberikan oleh Palestina pun tidak jelas. Hal ini dikarenakan politik dalam negara mereka yang belum rampung. Tidak ada pilihan militer, politik pemerintahan yang kacau karena terbagi menjadi dua fraksi yaitu Fatah dan Hamas dengan kepercayaan dan strategi yang berbeda pula dalam membawa Palestina sebagai sebuah negara. (Massimiliano Fiore 2020)

Israel pun untuk mewujudkan terjadinya perdamaian dengan Palestina, jika memungkinkan menyeretnya masuk dalam *Abraham Accords* pun membutuhkan perjuangan yang besar. Perdamaian hanya akan terwujud jika kedua pihak menginginkan dan berjuang untuknya. *Abraham Accords* yang dapat menjembatani ini dengan menormalisasi hubungan antar pemerintah, dan berlanjut hingga normalisasi di akar rumput. Negara-negara yang terlibat dalam perjanjian perdamaian pun dapat membantu terwujudnya perdamaian ini. Bukannya menggeser kepentingan secara terang-terangan dan tidak melakukan aksi paska ditandatanganinya *Abraham Accords*, atau keadaan lebih buruk lagi ketika negara-negara Arab tidak lagi menaruh atensi terhadap konflik Israel Palestina, terutama untuk Palestina. (Aziz Ur Rehman 2020)

- Penekanan Iran di Kawasan

Keamanan suatu regional menurut Buzan dalam RSCT sangat dipengaruhi oleh relasi-relasi yang terbentuk atau dibentuk dalam suatu kawasan. (Buzan 2016) Kekuatan relasional inilah yang berusaha dibentuk oleh *Abraham Accords* dengan mengikat negara-negara di Timur Tengah dalam suatu perjanjian damai. Ikatan kerja sama dengan berlandaskan perjanjian damai ini hadir karena pola pertemanan akibat musuh bersama yang terbentuk, dan hubungan yang muncul ialah antar negara-negara yang terlibat dalam *Abraham Accords* dengan Iran. Pola pertemanan antar negara-negara yang terlibat dalam *Abraham Accords* tidak hanya terjadi dalam skala kawasan saja, namun juga dengan Amerika Serikat. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, Amerika Serikat memiliki pengaruh besar dalam keterlibatannya di perpolitikan Timur Tengah, dalam kasus ini, sebagai pihak ketiga atau mediator penandatanganan

*Abraham Accords*. Amerika Serikat tentu juga memiliki kepentingan yang sama dengan negara-negara terlibat, pun juga Israel, yaitu menangkal kekuatan Iran di kawasan.

Amerika Serikat memiliki hubungan yang kurang baik dengan Iran, terhitung sejak revolusi Iran pada 1979 silam. Revolusi Iran menandakan bahwa pola pemerintahan Iran yang awalnya dipimpin oleh Shah, dan memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, usai setelah revolusi yang dipimpin oleh Khomeini. Paska revolusi tersebut, Iran dipimpin oleh Mullah, atau para ulama dan merubah bentuk pemerintahan negara yang awalnya menganut pemerintahan monarki menjadi Republik Islam. (HALLIDAY 1982) Tidak selesai sampai di sana, paska revolusi, Iran aktif dalam pengembangan teknologi nuklir yang semakin membuat Amerika Serikat waspada. Hingga pada era kepemimpinan George Bush, Iran dijatui embargo ekonomi akibat pengembangan tenaga nuklir yang dilakukan. (Irawan 2021) Program nuklir yang dikembangkan oleh Iran, diklaim oleh Iran sebagai tenaga yang digunakan untuk kepentingan sipil terutama dalam pengembangan sumber energi keperluan sehari-hari dan telah diratifikasi sejak tahun 1970. Namun, nuklir merupakan tenaga yang memiliki persona bukan sebagai pembangkit tenaga untuk sipil, namun lebih mengarah ke hal-hal yang diartikan sebagai pengembangan senjata. Salah satunya senjata militer dan pemusnah massal.

Hingga saat ini, hubungan antara Amerika Serikat dan Iran masih berlanjut dalam pola *enmity* yang sama. Tensi antar kedua negara terus berkembang. Iran memiliki faksi persenjataan seperti misil jarak dekat, intelijen yang tersebar hampir di seluruh kawasan Uni Eropa, Amerika Latin, dan negara-negara lain. Dengan modal ini, Iran berhasil mengkonfrontasi Amerika Serikat dalam bidang teknologi militer dan keamanan kawasan. (Katzman, McInnis, and Thomas 2021) JCPOA yang dibuat oleh Amerika, awalnya hanya fokus pada upaya-upaya penghentian dan pelucutan program nuklir Iran saja. Namun, pada era Trump, Amerika Serikat memasukan juga masalah rudal balistik Iran, serta terkait dengan kelompok-kelompok di kawasan yang mendapat bantuan senjata dari Iran juga harus dihentikan dan dikaji secara serius. (Katzman, McInnis, and Thomas 2021)

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini merupakan langkah yang dapat dikatakan cukup agresif menanggapi geliat kekuasaan Iran di kawasan. Amerika Serikat seperti memiliki keharusan untuk merespon peningkatan Iran yang terjadi. Reaksi yang diberikan oleh Amerika Serikat ini, masih dengan pengamatan dengan *Regional Security Complex Theory* yang disampaikan oleh Buzan yang juga menggunakan alat analisis sistem internasional, memiliki pendekatan bahwa sistem internasional merupakan kontributor atau penyebab reaksi atau sikap yang dilakukan oleh suatu negara. Reaksi dan sikap ini terjadi karena tidak adanya suatu entitas yang lebih tinggi dari negara-negara yang bisa atau memiliki kebolehan mengatur negara-negara, sehingga sistem yang ada menurut pendekatan sistem internasional ialah sistem yang anarki. Pendekatan ini juga menggambarkan bahwa negara yang kuat dan yang berkuasa akan terus berusaha untuk melanggengkan kekuasaan dan kekuatannya di kancah global sementara yang lemah akan terus berusaha untuk dipinggirkan. (Hamka Hendra Noer 2022) Amerika dalam fenomena ini bersifat agresif karena Amerika sadar akan kekuatannya sebagai salah satu negara adidaya global, dan berusaha menekan kekuatan Iran di kawasan yang semakin menguat. Tidak adanya suatu entitas yang melarang keikutsertaan Amerika Serikat di perpolitikan kawasan Timur Tengah, bahkan mendapat sokongan dari negara-negara di kawasan menjadi alasan Amerika 'betah' untuk terus ikut dalam skema perpolitikan di sana. Termasuk melalui *Abraham Accords*.

- Distribusi Kekuasaan

Distribusi kekuasaan di kawasan Timur Tengah secara internal selama kurang lebih dua puluh tahun kebelakang telah mengalami banyak sekali perubahan. Mesir yang pernah menjadi pemain utama di kawasan, mulai melemah dalam berbagai aspek dan tidak lagi mengambil alih. Iraq saat pemerintahan Saddam Husein memiliki kekuatan besar hingga melakukan invasi ke Kuwait, namun juga tumbang saat diinvasi oleh Amerika Serikat pada 2003 silam. Distribusi kekuasaan internal yang besar, dan masih eksis hingga sekarang ialah Iran paska melakukan revolusi. Paham politik Iran yang berubah karena revolusi, mengakibatkannya juga merubah arah politik internal negaranya, termasuk arah politik luar negerinya. Iran mulai ditakuti karena memiliki senjata nuklir, siber, *proxy*, dan program misil. Ini menjadi salah satu alasan Negara-Negara Teluk memutuskan untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel. Israel menjadi salah satu negara yang strategis di kawasan untuk menaggulangi ancaman yang diakibatkan oleh Iran. (Megállapodások 2020)

Distribusi kekuasaan dalam dinamika kekuatan regional yang terjadi akibat dari *Abraham Accords* terhadap keamanan Timur Tengah memperlihatkan pola persahabatan dan pola permusuhan yang semakin diperkuat. Distribusi kekuasaan dari kekuatan eksternal cenderung lebih mendominasi. (Buzan 2016) Negara-negara yang terlibat dalam *Abraham Accords* mendapat distribusi kekuasaan yang kuat dari Amerika Serikat. Amerika Serikat selain menjadi pihak mediator dalam terbentuknya perjanjian perdamaian ini, juga menjadi pihak yang mendominasi dalam fenomena-fenomena yang terjadi setelahnya. Praktek penggunaan tajuk 'Perjanjian Perdamaian' yang dilakukan oleh negara-negara terlibat, ditambah dengan bantuan mediasi pihak ketiga oleh Amerika, menambah daftar panjang bahan untuk meningkatkan dampak politik regional bagi negara-negara terlibat. Hal ini berlaku baik, dan publik, sebagian besar melihat ini memang sebagai langkah menuju perdamaian di kawasan Timur Tengah, dan Amerika Serikat menjadi pihak utama yang sangat terlihat.

Amerika Serikat turut serta bernegosiasi dengan negara-negara yang terlibat dalam penandatanganan kesepakatan normalisasi hubungan bilateral ini. Tidak hanya dalam *Abraham Accords*, perjanjian sebelumnya yaitu normalisasi hubungan antara Mesir dengan Israel dan Yordania dengan Israel juga Amerika Serikat turut andil di dalamnya. (Maros and Juniar 2016) Peningkatan kerja sama dalam bidang ekonomi dan dalam bidang teknologi memang menjadi basis dalam dilakukan kerja sama ini oleh Amerika Serikat. Hal ini juga seturut dengan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, yaitu penjualan senjata dan menekan ambisi Iran di kawasan. (Yossef 2021) Keikutsertaan Amerika di kawasan tentu mempertebal kubu yang ada serta pembagian kekuasaan terjadi di sana. Amerika Serikat bersama dengan Israel memiliki ambisi yang sama, dan ambisi ini juga memiliki irisan dengan negara-negara lain di kawasan sehingga normalisasi mudah terjadi di antara mereka.

Tidak hanya pada kubu *Abraham Accords*, distribusi kekuasaan juga terjadi di pihak Iran, dengan Russia. Russia menjadi rekan Iran terutama dalam persenjataan dan militer. Ayatullah al Khomeini memiliki motto politik luar negeri "Melihat ke Timur" dan percaya bahwa pusat perpolitikan global di masa yang akan datang akan dipimpin oleh bangsa Timur. Russia memfasilitasi Iran dengan jet tempur dan sistem pertahanan udara tingkat lanjut.(Javad 2023) Isolasi ekonomi dan politik yang dirasakan baik oleh Iran dan Russia yang diakibatkan oleh



Amerika Serikat membuat Iran dan Russia memperkuat persahabatan mereka. hubungan yang semakin dekat, baik dalam bidang ekonomi dan militer direfleksikan oleh kedua negara dalam perang Suriah, dan juga ketika Iran akhirnya terlibat dan membantu Russia dalam perang melawan Ukraina. (Shine et al. 2023)

RSCT yang dipaparkan oleh Buzan melihat distribusi kekuasaan secara internal maupun eksternal, keduanya tidak bisa dilepaskan dari satu sama lain. Distribusi kekuasaan secara internal lebih dahulu terjadi di kawasan. Di Timur Tengah, distribusi kekuasaan kuat terjadi antara Iran dan Arab Saudi, sebagai pemimpin Negara-Negara Teluk. Penebalan perbedaan identitas ini cenderung menonjolkan kelompok Islam Sunni di Arab Saudi dan kelompok Islam Syiah di Iran. Awalnya pergolakan sampai pada level itu, hingga Iran mengalami revolusi pada 1979. (Maulana 2019) Revolusi ini mengembangkan Iran baik dari segi politik pemerintahan, maupun militer. Dalam prakteknya, Iran membutuhkan sokongan dan mendapatkannya dari Russia. Arab Saudi dan anggota Negara-Negara Teluk yang lain sudah sejak lama memiliki hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Distribusi kekuasaan tidak lagi hanya sebatas ekonomi, namun juga hingga ke arah politik, militer, dan persenjataan. Dalam RSCT yang disampaikan oleh Buzan, aktor eksternal yang ikut serta dalam distribusi kekuasaan di kawasan bergabung dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan memberikan fasilitas persenjataan, atau ikut serta langsung dalam militer negara tersebut. (Buzan 2016) Dalam kasus ini, kedua kubu sama-sama difasilitasi melalui persenjataan dari negara-negara luar yang turut serta dalam perpolitikan kawasan.

Distribusi kekuasaan yang terbentuk mengakibatkan adanya keberpihakan. Keberpihakan ini memunculkan kubu, dalam konteks ini kubu negara-negara yang menandatangani *Abraham Accords* bersama dengan Amerika Serikat dan negara-negara revisionis bersama dengan Russia. Keberpihakan ini, jika terus seperti ini tanpa kesadaran penuh negara-negara di kawasan, akan membentuk suatu kekuatan ekstrem. (Buzan 2016) Pola permusuhan tentu tidak dapat dihindari jika hal ini terus terjadi. Pembentukan kubu yang sangat kuat akibat dari terbentuknya *Abraham Accords* ini menjadi salah satu dampak yang berpengaruh bagi dinamika kawasan Timur Tengah. Biasanya, kawasan Timur Tengah terdiri dari banyak sekali kelompok fraksi kepentingan. Namun akibat dari *Abraham Accords* ini, salah satu dampak nyata yang terasa ialah pembentukan dua kubu yang sama-sama memiliki sokongan pihak eksternal dan kekuatan yang dapat dikatakan berimbang (Michnik 2021). Perimbangan kekuatan memang menjadi aksi-reaksi yang tercipta. Perjanjian dibentuk, mengikat suatu kelompok untuk tidak memerangi satu sama lain, namun justru mengancam kelompok lain yang merasa bahwa tindakan ini tidak lagi merupakan perimbangan kekuatan, namun lebih ke arah tekanan yang bisa saja membawa Timur Tengah, akibat dari kekuatan eksternal yang terus terlibat, menghasilkan terbentuknya kekuatan ekstrem. (Buzan 2016)

Kekuatan ekstrem dalam RSCT yang dipaparkan oleh Buzan tidak memiliki skala pasti bagaimana keadaan yang mengakibatkan suatu fenomena itu terbentuk karena keikutsertaan pihak eksternal yang terlalu dalam. Namun, hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu keadaan dimana peperangan mungkin terjadi, salah satunya ialah *proxy war*. Namun, dalam kasus *Abraham Accords* distribusi kekuasaan hingga mengakibatkan kekuatan ekstrem belum sepenuhnya terlihat. Kadar yang bisa dipakai ialah belum pecahnya perang di antara mereka. *Overlay* yang dimaksud Buzan memang terbentuk, tekanan dari kekuatan eksternal yang kuat

serta terlalu ikut campur urusan perpolitikan internal sangatlah nampak. Namun, kepentingan eksternal dan internal, tepatnya beberapa negara, berkelindan dengan baik. Kekhawatiran negara-negara yang ikut serta dalam *Abraham Accords* terhadap Iran, direspon baik oleh Amerika Serikat. Iran sebagai negara yang dianggap sebagai ancaman juga terus memperkuat kekuatan militer internalnya bersama dengan bantuan dari Russia. Distribusi kekuasaan yang terjadi antara aktor-aktor internal dan eksternal ini semakin nampak. Hal ini menjadi suatu tanda bahwa *Abraham Accords*, tidak hanya membentuk perjanjian perdamaian dan merupakan usaha-usaha untuk menggapai kestabilan di kawasan, namun juga perimbangan kekuasaan yang kuat di regional Timur Tengah.

## **KESIMPULAN**

Dinamika keamanan Timur Tengah sejak tahun 1940an mengalami perubahan hampir di setiap dekadanya. Dimulai dengan perseteruan antara negara-negara Arab dengan bangsa Israel. Israel yang hadir pasca Perang Dunia II dan masuk ke wilayah Palestina, mengatakan bahwa itu adalah 'Tanah Yang Dijanjikan' oleh Tuhan mereka. Negara-negara Arab bersatu dan memerangi bangsa Israel. Dalam peristiwa ini, pihak luar banyak terlibat dalam penyebab dan penyelesaian konflik, salah satunya ialah Amerika Serikat yang mengusulkan bahwa pembentukan normalisasi hubungan antara Mesir yang saat itu gencar memerangi Israel, dengan Israel. Normalisasi hubungan antara Mesir dan Israel terjadi, Mesir di bawah kepemimpinan Anwar Sadat melihat bahwa aksi realistis yang dilakukan akan membawa Mesir pada keuntungan di masa mendatang, serta akan membantu mewujudkan cita-cita perdamaian kawasan Timur Tengah. Masuk pada dekade selanjutnya, Iran mengalami revolusi. Revolusi Iran berdampak besar bagi arah perpolitikan Timur Tengah, bahkan hingga hari ini. Iran menjadi Republik Islam dengan sistem pemerintahan Walliyat Al Faqih. Pada era kepemimpinan Khomeini, Iran diperintah oleh para Ulama atau disebut juga sebagai Mullah. Manuver politik besar terjadi pada era ini, revolusi Iran menandakan awal mula pembagian kubu yang ada di Timur Tengah. Masuk pada tahun 1980-1988, Perang Teluk I terjadi. Perang ini dimulai oleh Iraq, yang saat itu dipimpin oleh Saddam Husein, memutuskan perjanjian yang berkaitan dengan pembagian wilayah dengan Iran. Iraq melihat situasi Iran yang baru melaksanakan revolusi ini sebagai sasaran empuk. Namun, pada Perang Teluk I, Iran mampu bertahan dan Iraq memang memenangkan peperangan ini, namun dengan biaya yang sangat besar. Perang dalam kawasan lanjut terjadi pada Perang Teluk II. Iraq yang menginvasi Kuwait karena merasa bahwa Kuwait secara historik adalah bagian dari Iraq, dan Iraq yang sudah lemah secara ekonomi karena Perang Teluk I. Iraq menginvasi Kuwait dengan harapan bisa menguasai ladang minyak raksasa di sana. Namun justru Iraq mendapat perlakuan tidak menyenangkan, ditambah lagi dengan harga minyak yang anjlok dan pasar yang dimainkan oleh Amerika mengakibatkan Iraq tidak bisa berbuat apa-apa. Dinamika berlanjut ketika Timur Tengah dalam masa yang cukup tenang, ketika Yordania menormalisasi hubungannya dengan Israel. Masih dengan alasan yang sama dengan Mesir, yaitu pembangunan ekonomi dan perwujudan cita-cita kestabilan kawasan Timur Tengah. Masuk pada tahun 2003, Amerika Serikat menginvasi Iraq. Amerika menginvasi Iraq dengan alasan bahwa Iraq terlibat dalam serangan teroris 9/11, dan juga Iraq menyimpan senjata pemusnah massal yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya oleh Amerika. Namun, seluruh dunia mengetahui alasan Amerika menginvasi Iraq ialah karena sumber daya minyak yang dimiliki oleh Iraq. Manuver perubahan politik terjadi pada era ini. Amerika Serikat yang padahal pada Perang Teluk I menyuplai senjata

ke Iraq untuk melawan Iran, tiga belas tahun setelahnya, Amerika terang-terangan dan secara massif menginvasi Iraq. Pada tahun 2011, *Arab Spring* terjadi di dataran Arab. Musim Semi Arab ini dimulai dari Tunisia, dan menjalar ke beberapa negara termasuk Mesir dan Suriah. Musim Semi Arab ini merupakan proses masuknya demokrasi ke dataran Arab dan dalam proses masuknya, mendapat banyak sekali pergolakan politik. Demonstrasi dan perang sipil tidak bisa dihindari. Era ini juga dikatakan sebagai era pelemahan pemerintahan politik di kawasan Timur Tengah. *Arab Spring* melahirkan beberapa perang sipil, salah satunya yang cukup hebat ialah perang sipil di Suriah. Kelompok pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Bashar al Asaad, menolak turun ketika kelompok oposisi memerangi mereka. Perang di Suriah ini merupakan perang proksi yang jelas terlihat. Ketika Iran dan Russia memihak kelompok pemerintah al Assad. Sedangkan Turki, Amerika, NATO, dan beberapa negara Arab memihak pihak oposisi secara terang-terangan. Masuk pada tahun 2020 kemarin, normalisasi kembali terjadi. Kali ini antara Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan terhadap Israel. Sama seperti dua normalisasi sebelumnya, Amerika Serikat tetap turut andil menjadi pihak ketiga dalam normalisasi yang disebut sebagai *Abraham Accords* ini.

*Abraham Accords* merupakan perjanjian perdamaian normalisasi hubungan yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan dengan Israel. Perjanjian ini mulai disahkan pada 15 September 2020 di Gedung Putih, Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump sebagai pihak ketiga dalam perjanjian. Uni Emirat Arab dalam perjanjian ini menyepakati kerja sama dalam bidang sipil dan juga militer, penundaan invasi terhadap Tepi Barat, dan juga pembebasan warga Uni Emirat Arab untuk datang dan beribadah di kawasan Masjid al-Aqsa. Negara kedua yang menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel dalam *Abraham Accords* ini ialah Bahrain. Bahrain, secara tidak langsung memiliki kepentingan politik dengan Amerika Serikat. Kesepakatan damai yang disetujui oleh Bahrain juga masih dalam radar perjanjian yang sama dengan Uni Emirat Arab, perihal perwujudan cita-cita keamanan dan kestabilan kawasan Timur Tengah, kerja sama di bidang sipil, ekonomi, investasi, dan lain sebagainya. Negara ketiga yang menandatangani perjanjian *Abraham Accords* ialah Maroko. Maroko memiliki kepentingan nasional yang lebih spesifik, yaitu terkait dengan kedaulatan penuh Sahara Barat dan penyelesaian konflik dengan ketentuan yang akan dilakukan Maroko. Namun, isi perjanjian kedua negara tetap sama dengan perjanjian *Abraham Accords* dua negara lainnya, terkait dengan perwujudan cita-cita keamanan dan kestabilan kawasan, perjanjian di bidang sipil, ekonomi, dan lain sebagainya. Israel sebagai pemeran utama dalam perjanjian ini pun memiliki kepentingan-kepentingan yang bisa terwujud dengan melaksanakan perjanjian perdamaian. Salah satu irisan kepentingan yang mendasari terbentuknya perjanjian ini di antara negara-negara yang terlibat adalah menaggulangi kekuatan Iran yang dikatakan sebagai ancaman terhadap kestabilan keamanan kawasan Timur Tengah.

Dampak yang terjadi paska ditandatanganinya perjanjian perdamaian *Abraham Accords* ini ialah hubungan antar satu negara dengan negara lainnya yang semakin nampak terlihat. Hubungan yang nampak ini antara Negara-Negara Teluk, yang terdiri dari: Uni Emirat Arab; Bahrain; Saudi Arabia; Oman; Qatar; dan Kuwait dengan Israel dan Amerika Serikat. Keterikatan ini membentuk perjanjian, kerja sama, hingga aktivitas-aktivitas nyata yang merupakan manifestasi dari perjanjian yang ada. Manifestasi yang dilakukan, terutama dalam pelaksanaan kerja sama di bidang sipil, tranfer persenjataan dan teknologi militer, konflik

Palestina dan Israel, hingga penekanan Iran di kawasan. Dampak dalam bidang militer dan persenjataan, Israel menjadi salah satu opsi pembentukan aliansi, karena posisi tawar yang dimilikinya cukup kuat dibanding dengan yang lain. Transfer kekuatan militer serta teknologi sipil dengan Israel merupakan pilihan yang cerdas. Bentuk nyata berupa latihan militer gabungan yang dilakukan pada November 2021 silam menunjukkan bahwa aliansi memang terbentuk. Perjanjian ini juga berdampak bagi konflik Israel dan Palestina. Perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dalam salah satu konflik terpanjang yang terjadi di era modern ini menunjukkan bahwa dua sisi Israel memang nyata dan nampak di kawasan. Tidak adanya aksi nyata yang dilakukan dan arah perjanjian perdamaian yang apakah akan mengikutsertakan Palestina yang masih belum rampung dengan urusan domestiknya pun menjadi pertanyaan banyak akademisi. Perjanjian perdamaian ini justru fokus pada penekanan Iran di kawasan. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat menjadi pihak ketiga justru seperti menjadi penyetir arah gerak perpolitikan kawasan paska *Abraham Accords* ditandatangani. Amerika Serikat merasa harus ikut serta dalam kebangkitan Iran di kawasan, terutama terkait dengan bidang militer dan persenjataan. Kebangkitan kekuatan Iran di kawasan ini juga diamini oleh Israel, dan negeri-negara yang terlibat dalam perjanjian. Melihat Iran sebagai suatu ancaman nyata di kawasan hingga membentuk aliansi untuk menyeimbangkan ancaman. Distribusi kekuasaan nyata dan kuat terjadi antara Amerika Serikat dengan negara-negara yang terlibat dengan *Abraham Accords* serta Negara-Negara Teluk, dan Iran dengan Russia. Sehingga perjanjian perdamaian yang membentuk aliansi ini tidak hanya selesai pada citra mewujudkan cita-cita perdamaian di kawasan Timur Tengah, namun juga membentuk perimbangan kekuasaan di sana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhadid, Yahya. n.d. "What Was Really Behind Bahrain's Normalization With Israel?" Dawnmena. <https://dawnmena.org/what-was-really-behind-bahrain-normalization-with-israel/>.
- Arsyam, Muhammad, and M. Yusuf Tahir. 2021. "Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2 (1): 37–47. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.17>.
- Aziz Ur Rehman. 2020. "(PDF) Causes behind the Abraham Accord and Its Consequences for the Peace Process in the Middle East." *The Middle East International Journal for Social Sciences* 2 (2): 73–83. [https://www.researchgate.net/publication/346879739\\_Causes\\_behind\\_the\\_Abraham\\_Accord\\_and\\_its\\_consequences\\_for\\_the\\_Peace\\_Process\\_in\\_the\\_Middle\\_East](https://www.researchgate.net/publication/346879739_Causes_behind_the_Abraham_Accord_and_its_consequences_for_the_Peace_Process_in_the_Middle_East).
- Bakry, Umar Suryadi. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. III. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR.
- Baqai, Huma, and Sabiha Mehreen. 2021. "Abraham Accords: A Journey From Arab-Israeli to Palestinian-Israeli Conflict." *JISR Management and Social Sciences & Economics* 19 (1): 113–26. <https://doi.org/10.31384/jjsrmsse/2021.19.1.8>.
- Bilgin, Pinar. 2019. "Regional Security in the Middle East." *Regional Security in the Middle East* d (Zulfqar 2018): 1–11. <https://doi.org/10.4324/9781315204123>.
- Buzan, Barry. 1991. *People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies. Post-Cold War Era*. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=sURLAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sustainable+development+goals+social+economic+dan+enviromental+triple+bottom+line&ots=\\_34SNU9eov&sig=1x2wuFIPWrnPsQr8FWEM3agDqdk%0Ahttp://213.55.90.4/admin/home/Dmu+Academic+Resourc](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=sURLAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sustainable+development+goals+social+economic+dan+enviromental+triple+bottom+line&ots=_34SNU9eov&sig=1x2wuFIPWrnPsQr8FWEM3agDqdk%0Ahttp://213.55.90.4/admin/home/Dmu+Academic+Resourc).
- Fauziyah, Siti. 2014. "Perang Arab Israel." *TSAQOFAH* 12 (Perang): 254–74.

- HALLIDAY, FRED. 1982. "The Iranian Revolution." *Political Studies* 30 (3): 437–44.  
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1982.tb00551.x>.
- Indriana, Nilna. 2017. "PEMETAAN KONFLIK DI TIMUR TENGAH (Tinjauan Geografi Politik)." *Jurnal Humaniora* 1 (1): 14–23.
- Institution, The Brookings. 2020. "THE CURRENT: What Prompted the UAE and Bahrain's Normalization of Relations with Israel?" [https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/09/20200917\\_TheCurrent\\_Sachs\\_transcript.pdf](https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/09/20200917_TheCurrent_Sachs_transcript.pdf).
- Irawan, Deni. 2021. "Dinamika Keamanan Kawasan Timur Tengah Dalam Persaingan Kekuatan Iran Dan Amerika Serikat." *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 6 (2): 221–48.  
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/6593>.
- Javad, Heiran-Nia. 2023. "Iran Boosts Military Ties with Russia in Part to Counteract Abraham Accords." 2023. <https://www.stimson.org/2023/iran-boosts-military-ties-with-russia-in-part-to-counteract-abraham-accords/>.
- Katzman, Kenneth, Kathleen J. McInnis, and Clayton Thomas. 2021. "U.S.-Iran Conflict and Implications for U.S. Policy." *Iran: U.S. Relations, Foreign Policies and Sanctions*, 85–111.
- KOCH, BETTINA, and YANNIS A. STIVACHTIS. 2011. *Regional Security in the Middle East: Sectors, Variables and Issues. E-International Relations*.
- Maros, Hikmah, and Sarah Juniar. 2016. "Normalisasi Hubungan Israel Dengan Negara-Negara Arab Terhadap Keberlangsungan Konflik Israel Palestina," 1–23.
- Massimiliano Fiore. 2020. "The Abraham Accords and the Palestinian Issue." *E-International Relations*, 1–4.
- Maulana, Muhamad Syahdy. 2019. "Persaingan Kekuatan Saudi Arabia (Sunni) Dan Iran (Syiah) Pada Kasus Konflik Kontemporer (Suriah Dan Yaman)." *Jurnal Gama Societa* 2 (2): 101.  
<https://doi.org/10.22146/jgs.48867>.
- Megállapodások, Ábrahám. 2020. "The Abraham Accords." *KKI-Elemzések*, no. May.
- Michnik, Wojciech. 2021. "Great Power Rivalry in the Middle East." 2021.  
<https://www.realinstitutoelcano.org/en/commentaries/great-power-rivalry-in-the-middle-east/>.
- Mudore, Syarif Bahaudin, and Nurlaila Safitri. 2019. "Dinamika Perang Suriah." *Politea : Jurnal Politik Islam* 2 (2): 67–92. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1437>.
- Muhamad, Simela Victor. 2020. "Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab–Israel Dan Isu Palestina." *Info Singkat* 17 (1): 7–12.
- Muriel Asseburg and Sarah Ch Henkel. 2021. "Normalisation and Realignment in the Middle East." *German Institute for International and Security Affairs* 45 (45): 10. [https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2021C45\\_MiddleEast.pdf](https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2021C45_MiddleEast.pdf).
- Muttaqien, M. 2017. "Arab Spring: Dimensi Domestik, Regional Dan Global." *Jurnal Global & Strategis* 9 (2): 262. <https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.262-276>.
- Muttaqin, Muhammad Zainal. 2018. "Ideologi: Faktor Konflik Dan Kegagalan Timur Tengah." *Nation State Journal of International Studies* 1 (2): 207–19. <https://doi.org/10.24076/nsjjs.2018v1i2.134>.
- Ningthoujam, Alvite. 2022. "The Military–Security Dimension of the 2020 Abraham Accords: An Israeli Perspective." ORF Online. 2022. <https://www.orfonline.org/expert-speak/the-military-security-dimension-of-the-2020-abraham-accords/>.
- Noer, Hamka Hendra. 2022. "Perang Dan Keamanan Dalam Tinjauan Teori Neorealisme Dan Institusionalisme." *Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 3 (1): 25–36.

<https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx>.

- Norlen, Tova, and Tamir Sinai. 2020. "The Abraham Accords – Paradigm Shift or Realpolitik? | George C. Marshall European Center For Security Studies." *GEORGE C. MARSHALL European Center for Security Studies*, no. 64. <https://www.marshallcenter.org/en/publications/security-insights/abraham-accords-paradigm-shift-or-realpolitik#toc-executive-summary>.
- Published, Article. 2012. "The Gulf War 1990-1991 and the Study of International Relations The Gulf War 1990-1991 and the Study Of." <https://doi.org/10.1017/S026021050011784X>.
- Quarterly, Studies. 1994. "GULF WAR : THE SOCIO-POLITICAL BACKGROUND Author ( s ) : Abdulkhaleq Abdulla Source : Arab Studies Quarterly , Summer 1994 , Vol . 16 , No . 3 ( Summer 1994 ) , Pp . 1-13 Published by : Pluto Journals Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/41858983>" 16 (3): 1–13.
- Ruslin, Ismah Tita. 2013. "Memetakan Konflik Di Timur Tengah (Tinjauan Geografi Politik)." *Jurnal Politik Profetik* 1: 1–23.
- Saab, Bilal. 2022. "The Security Dimension of the Abraham Accords." *Defense One*. 2022. <https://www.defenseone.com/ideas/2022/04/security-dimension-abraham-accords/366147/>.
- Shine, Sima, Arkady Mil-man, Sarah Lerech-zilberberg, and Bat Chen Druyan. 2023. "Deepening Cooperation between Iran And," no. 1677.
- Tahmi, A Rizki, Mohamad Rosyidin, Dan Muhammad, and Faizal Alfian. 2022. "Analisis Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab Dalam Normalisasi Hubungan Dengan Israel." *Journal of International Relations* 8: 325–33. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite>:<http://www.fisip.undip.ac.id>.
- Tasnur, Irvan, and Fitra Widya Wati. 2019. "Konflik Sunni-Syiah Pasca Arab Spring: Menelusuri Motif Politik Dibalik Perang Berkepanjangan Di Suriah." *Jurnal Academia Praja* 2 (02). <https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.112>.
- TWB, The World Bank. 2019. "Api\_Ny." <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>.
- Umam, Khotibul. n.d. "Rivalitas Arab Saudi , Iran , Dan Israel Di Kawasan Timur Tengah" 10 (2): 1–10.
- Washington, Büro. 2008. "US Interests in the Arab World : Democracy Promotion by American NGOs."
- Wicaksono, Raden. 2020. "Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab Dalam Normalisasi Hubungannya Dengan Israel." *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 7 (2): 132–54. <http://meis.ui.ac.id/index.php/meis/article/view/125>.
- Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. 2020. "Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab Dengan Israel: Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim Terhadap Palestina." *Jurnal ICMES* 4 (2).
- Yossef, A. 2021. "The Regional Impact of the Abraham Accords." *Modern War Institute* 20 (2): 1–17.